

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif karena mengangkat isu hukum yaitu kekaburan hukum terkait pertanggungjawaban pidana dalam program *stand up comedy* melalui media elektronik yang mengandung unsur penghinaan agama. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹

B. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dikarenakan jenis penelitian ini sendiri yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema

¹Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm.

sentral penelitian.² Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pendekatan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait khususnya Pasal 156a KUHP, Pasal 28 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 36 ayat (6) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

C. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yuridis normatif yaitu suatu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yakni :

1. Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP
2. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3. Pasal 36 ayat (6) Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

² Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 302

5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/Kpi/03/2012
Tentang Standar Program Siaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil dari pendapat para ahli, asas-asas, prinsip-prinsip, maupun teori-teori yang bersumber dari buku, artiket, jurnal, maupun internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan baku tersier dari penelitian ini mengambil makna-makna suatu istilah yang bersumber dari Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. TEKNIK MEMPEROLEH BAHAN HUKUM

Dalam penelitian ini, teknik memperoleh bahan hukum dilakukan dengan melalui Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan tindak pidana penghinaan terhadap agama. Dalam hal ini penulis memperoleh bahan hukum dari Perpustakaan.

E. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa interpretasi atau penafsiran, sebagai berikut :

1. Interpretasi Gramatikal atau Bahasa

Interpretasi Gramatikal/Bahasa merupakan interpretasi dengan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.³

2. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis merupakan interpretasi dengan cara menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.⁴

F. DEFINISI KONSEPTUAL

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban atau pembalasan bagi seseorang terhadap perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan

b. *Stand Up Comedy*

Suatu Komedi tunggal, artinya seseorang menyampaikan berbagai macam materi lawakan yang dibungkus sedemikian rupa dengan berdiri diatas panggung yang bermodalkan *microphone* didepannya.

c. Media Elektronik

Sebuah media yang menyampaikan sesuatu, yang berbentuk elektronik.

³ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 171

⁴ Ibid, hlm. 172

d. Penghinaan Agama

Penghinaan agama adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik suatu agama yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang lain.